

**KEBIJAKAN KEAGAMAAN SRI SULTAN HAMENGKU
BUWONO I DI KASULTANAN YOGYAKARTA
TAHUN 1755-1792**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Adab
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Agama**

**KHOIRUN NISAK
97121947**

**JURUSAN SEJARAH DAN PERADABAN ISLAM
FAKULTAS ADAB
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001**

ABSTRAK

Kebijakan keagamaan Sri Sultan HB I merupakan rangkaian konsepsi dan asas yang menjadi garis besar rencana atau aktifitas di Kasultanan Yogyakarta (1755-1792) untuk mengembangkan kehidupan keagamaan. HB I berperan selaku Sultan Yogyakarta bertugas mengatur pemerintahannya sebagai realisasi atas tugas dan fungsinya sebagai khalifatullah berupa rangkaian pemikiran tindakannya dalam mensyiaran agama Islam kepada rakyat.

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif analitik dan merupakan penelitian histories . Dengan deskriptif sebagai metode diharapkan dapat menghasilkan gambaran deskriptif bersifat menguraikan kejadian dengan dimensi ruang dan waktu. Dengan analitik bersifat membentangkan faktor-faktor kondisional dalam determinan-determinan dari peristiwa serta menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana.

Bentuk kebijakan yang dikeluarkan Sri Sultan HB I terbagi atas kebijakan di bidang social keagamaan, hukum dan upacara keagamaan. Di bidang social keagamaan terealisasi dengan berdirinya masjid Agung dan masjid Pathok Negara. Sedangkan upacara keagamaan yang ada di Kasultanan Yogyakarta adalah gerebeg, sekaten dan labuhan. Dalam bidang hukum diadakan Pengadilan Surambi sebagai bentuk peradilan di Kasultanan.

Kata kunci: Sri Sultan Hamengku Buwono I, kebijakan

Drs. Jahdan Ibnu Humam Saleh, M.S
Dosen Fakultas Adab
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudari Khoirun Nisak

Lamp. :-

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Adab
IAIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Khoirun Nisak
NIM : 97121947
Judul : Kebijakan Keagamaan Sri Sultan Hamengku Buwono i
di Kasultanan Yogyakarta Tahun 1755-1792

Saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah layak untuk dimunaqosyahkan. Oleh karena itu, diharapkan Saudari tersebut dapat segera dipanggil guna mempertanggungjawabkan skripsinya.

Atas perhatiannya saya ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 30 Nopember 2001

Dosen Pembimbing


Drs. Jahdan Ibnu Humam Saleh, M.S
NIP. 150202.821



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ADAB
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Tilpun (0274) 513949

DEKLARASI

Skripsi dengan judul :

Kelijakan Keagamaan Sri Sultan Hamengku Buwono I di Kerajaan Yogyakarta
Tahun 1755-1792

Dijalankan oleh :

Nama : Fitriadi Nizam
NIM : 1301100001
Program : Tarbiyah Sosial I
Jurusan : Sosial dan Peradaban Islam

telah diujiqasyahkan pada hari : Senin tanggal : 10-12-2001 dengan nilai : B+ dan telah
ditujukan untuk sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Studia I Agama.

Pada : 11/12/2001 di Yogyakarta.

Dr. R. Sugiharto, S.Si, M.A.
NIP. 1301096101

Dr. S. Sugiharto, S.Si, M.A.
NIP. 130220792

Dr. H. Djoko Purnomo, S.Si, M.A.
NIP. 1301202827

Dr. R. Sugiharto, S.Si, M.A.
NIP. 1301096101

Dr. S. Sugiharto, S.Si, M.A.
NIP. 130220792



PERSEMPAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk

Ibu Hindun tercinta, Bapak H.M Wardani
Kakak dan Adikku (Iril, Husen, Lela)
Keponakanku tersayang
Saudaraku tercinta Hajar dan Ima

MOTTO

يَا يَهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ هُمُ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya)
dan ulil amri di antara kamu.

Q.S. An- Nisaa' : 59*

* Al-Qur'an dan Terjemahnya (Jakarta: Departemen Agama RI, 1989), hlm. 128

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMPAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	5
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan dan Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian dan Pembahasan.....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II. KONDISI MASYARAKAT DI KASULTANAN	
YOGYAKARTA	13
A. Kehidupan Keagamaan Masyarakat Yogyakarta	13
B. Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Yogyakarta	19
C. Kondisi Politik Kasultanan Yogyakarta.....	23
BAB III. KASULTANAN YOGYAKARTA	30
A. Sejarah Berdirinya Kasultanan Yogyakarta	30
B. Pemerintahan Kasultanan Yogyakarta	39
BAB IV. KEBIJAKAN KEAGAMAAN HAMENGKU BUWONO I	49
A. Aktifitas Keagamaan Hamengku Buwono I	49
B. Hubungan Hamengku Buwono I dengan Ulama.....	51
C. Bentuk-Bentuk Kebijakan Keagamaan Hamengku Buwono I.....	55

C.1. Kebijakan di Bidang Sosial Keagamaan	56
C.2. Kebijakan di Bidang Hukum.....	61
C.3. Kebijakan di Bidang Upacara Keagamaan.....	63
BAB V. PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah berdirinya Kasultanan Yogyakarta tidak bisa dilepaskan dari kerajaan Mataram. Sebagai suatu daerah yang menghasilkan wangsa Jawa modern yang paling kuat dan yang paling lama. Masa kekuasaan Panembahan Senopati (± tahun 1584-1601), di dalam kronik-kronik Jawa digambarkan sebagai pemrakarsa pengluasan kerajaan Mataram¹. sesuai dengan gelar yang dipakai yaitu Senopati Ing Alaga Savidin Panatagaima yang berarti Panglima Perang dan Ulama pengatur kehidupan beragama, banyak melakukan ekspansi dalam rangka perwujudan dari cita-cita dan gagasannya bahwa Mataram harus menjadi pusat budaya dan agama Islam untuk menggantikan Kesultanan Demak. Ada suatu rumusan sejarah bahwa manusia selalu mengikuti agama yang dianut oleh penguasanya (An-nas ‘ala mulukihim)². Hal inilah yang menjadi salah satu faktor agama Islam menjadi dominan dalam bidang-bidang kehidupan bagi perkembangan kerajaan Mataram selanjutnya.

Babak baru terjadi di kerajaan Mataram, setelah terjadinya perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755. Perjanjian ini dimaksudkan sebagai upaya penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi oleh Pangeran Mangkubumi dan Sunan Paku Buwono, walaupun sebenarnya merupakan politik dari Belanda untuk

¹ M. C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, terjemahan Dharmo Hardjowidjono (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1995), hlm. 60

² Ensiklopedi Islam Indonesia, Jilid 3 (Jakarta : Depag, 1993), hlm. 199

memecah-belah kerajaan Martaram. Perjanjian ini ditandatangani oleh Pangeran Mangkubumi dan Sunan Paku Buwono III dan didampingi oleh Nicholas Hartingh³. isi perjanjian antara lain menyatakan bahwa wilayah Mataram dibagi dua yaitu Surakarta dan Yogyakarta. Dalam pasal 1 perjanjian Giyanti menyebutkan bahwa Pangeran Mangkubumi diangkat menjadi Sultan atas setengah kerajaan Jawa dengan gelar *Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Alaga Ngabdurrakhman Sayidm Panataguma Kalifatullahi*⁴. Dengan demikian dimulailah masa pemerintahan yang panjang (1755-1792) sebagai seorang penguasa yang paling cakap dari keluarga sejak Sultan Agung⁵.

Pangeran Mangkubumi yang dinobatkan sebagai Sultan Hamengku Buwono I lahir pada tanggal 4 Agustus 1717 dengan nama B.R.M. Sudjono, putra dari Sunan Amangkurat IV.⁶ Sejak kecil B.R.M. Sudjono memiliki kepribadian yang mengagumkan. Beliau lebih senang hidup berprihatin, bergaul dengan rakyat kecil dan suka bersedekah dengan kaum fakir miskin. B.R.M Sudjono pernah meninggalkan Keraton dan mengabdi pada sebuah keluarga petani yang sederhana, sampai akhirnya mendapatkan ilmu di bidang pertanian.

Berbagai ketampilan lainnya seperti beladiri, keprajuritan, kesusastraan, kesenian dan ilmu tata bangunan dikuasai oleh B.R.M. Sudjono. Bahkan beliau

³ Jandra. M dkk, Perangkat/ Alat-alat Pakaian Serta Makna Simbolis Upacara Keagamaan di Lingkungan Keraton Yogyakarta (Yogyakarta : Depdikbud, 1991). hlm 25

⁴ Berbeda dengan gelar yang dipakai seorang Kepala Negara di Surakarta yakni Sunan atau Susuhunan sehingga melahirkan konsep kesunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Dikisahkan pula bahwa pembesar Belanda terkejut dengan pemakaian gelar Sultan oleh Mangkubumi karena dinilai lebih tinggi daripada Susuhunan. Lihat G. Moejanto, Konsep kekuasaan Jawa, (Yogyakarta : Kanisius, 1987), hlm 122

⁵ M. C. Ricklef, Op. Cit, hlm. 148.

⁶ R. M. Soemarjo Nitinegoro. Sejarah Berdirinya Kota Kebudayaan Yogyakarta Hadiningrat. (Yogyakarta : Yayasan Pendidikan Tinggi Putra Jaya, 1980), hlm 17

adalah seorang ahli bangunan yang membuat desain ibu kota Surakarta dan juga Yogyakarta⁷. Kepribadian yang baik didukung oleh keahlian yang memadai di berbagai bidang menjadi modal utama bagi Sri Sultan Hamengku Buwono I untuk mengembangkan kota Yogyakarta menuju ke arah kemajuan.

Pada tanggal 13 Maret 1755 resmi berdirinya negara Ngayogyakarta Hadiningrat yang beribukota di Ngayogyakarta⁸. Nama ini berasal dari bahasa Sansekerta 'Ayodhya' yang terdapat dalam epos Ramayana⁹ yang berarti perang. atau a (a artinya tidak dan yodhya berarti perang) dan karta artinya bahagia, tenram. Dengan demikian Ngayogyakarta dapat diartikan sebagai kota yang aman dan tenram. Istilah Hadiningrat mengandung arti di atas bumi, sedangkan pembangunan Keraton dimulai pada tanggal 9 Oktober 1755 dan selesai pada tahun 1756¹⁰.

Menurut Islam setelah Nabi Muhammad saw wafat, pimpinan negara dan agama diserahkan kepada khulafau Ar-Rosyidin yaitu Abu Bakar, Umar bin Khatab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Tholib sebagai pemimpin, khalifah juga bertugas mengatur agama (panatagama) dan juga kepala negara (Khalifah). Hal ini tercermin dalam nama yang dipakai oleh penguasa Mataram : *Sampeyan Dalem Ingkang Simuhun Kangjeng Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Alaga Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatulah*. Gelar itu sendiri berasal dari

⁷ Sutrisna Kutoyo, Sri Sultan HB IX Riwayat hidup & Perjuangan. (Jakarta : PT Mutiara Sumber Widya, 1996). hlm 38

⁸ Darma Sugita, Kota Yogyakarta 200 thn 7 Okt 1756 – 7 Okt 1959. (Yogyakarta : Panitia Peringatan yogyakarta 200 thn, 1959), hlm 13

⁹ M. C Ricklefs, Jogyakarta Under Mangkubumi 1749 – 1792. (London : Oxford University Press, 1974), hlm 80

¹⁰ Djoko Soekiman, Sejarah Kota Yogyakarta. (Jakarta : Depdikbud, 1986),hlm 7

istilah Arab yang berarti penguasa kerajaan. Dalam konsep Jawa memandang Sultan sebagai seorang yang dianugerahi kerajaan yang memiliki kekuasaan politik, militer dan keagamaan yang absolut, identik dengan kekhilafahan dan kasultanan di negara-negara Islam di Timur Tengah yang tidak memisahkan kekuatan politik dengan kekuasaan agama¹¹.

Gelar Panetep Panatagama dan Kalifatulah yang sesuai dengan konteks Islam, oleh Sri Sultan berusaha dikembangkan dengan melakukan kebijakan-kebijakan yang didasari oleh nilai-nilai agama, seperti membangun Masjid Pathok Negara, pengangkatan penghulu Keraton yang bertugas memimpin kegiatan dan upacara keagamaan yang dilaksanakan secara Islam, berlakunya hukuman potong bagi pencuri membuktikan adanya hukum Islam diterapkan di Keraton Yogyakarta.

Seorang Sultan memiliki suatu tugas sebagai pengayom utama kegiatan kebudayaan Jawa-Yogya, agama, etika, filsafat, upacara adat dan berbagai cabang kesenian¹². Agama Islam di samping itu merupakan unsur yang memberikan warna bagi kehidupan budaya di keraton Yogyakarta. Oleh karena Sri Sultan Hamengku Buwono I berusaha meneruskan tradisi dari para pendahulunya dari dinasti Mataram dalam menyiarkan agama Islam. Salah satu usaha tersebut berupa upacara yang bernama Gerebeg¹³. Dengan menyelenggarakan upacara ini, secara publik terlihatlah Kasultanan Yogyakarta ini sebagai kerajaan Jawa-Islam.

¹¹ Selo Soemardjan, Perubahan Sosial Di Yogyakarta, (Yogyakarta Universitas Gadjah Mada Press) 1998

¹² Sutrisno Kutoyo, Op.Cit, hlm 26

¹³ B. Soelarto, Gerebeg di Kasultanan Ngavogyokarto, (Yogyakarta : Proyek Sarana Budaya, 1970/1986), hlm 27

Upacara Gerebeg ini bersifat religius yang dikaitkan dengan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dan dua hari raya umat Islam (Idul Fitri dan Idul Adha). Tradisi Gerebeg ini juga bermakna historis yang berkaitan dengan keabsahan Sultan dan Kasultanan Yogyakarta sebagai pewaris syah dari Panembahan Senopati dengan Kerajaan Mataram-Islam.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Penelitian ini berupaya mengungkapkan kebijakan keagamaan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I di Kasultanan Yogyakarta tahun 1755-1792.

Kebijakan keagamaan yang dimaksudkan adalah rangkaian konsepsi dan asas yang menjadi garis besar rencana atau aktifitas di Kasultanan Yogyakarta (1755-1792) untuk mengembangkan kehidupan keagamaan di wilayah itu. Dengan demikian kebijakan keagamaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah garis besar rencana atau aktifitas Hamer^{ku} Buwono I selaku Sultan Yogyakarta dalam mengatur pemerintahannya sebagai realisasi atas tugas dan fungsinya sebagai seorang Khalifatullah berupa rangkaian pemikiran dan tindakannya dalam mensyiaran agama Islam kepada rakyat.

Bentuk kebijakan yang dijalankan oleh Sultan yang didasari oleh nilai-nilai agama Islam itu berupa pembangunan masjid, pemberlakuan hukum Islam di kasultanan Yogyakarta dan upacara-upacara yang mengandung nilai-nilai Islam.

C. BATASAN DAN PERUMUSAN MASALAH

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh Sultan Hamengku Buwono I di Kasultanan Yogyakarta yang menyangkut kebijakan keagamaan sekitar tahun 1755 – 1792.

Berdasarkan anggapan bahwa Sultan Hamengku Buwono I membuat kebijakan yang bersifat keagamaan di Kasultanan Yogyakarta, maka diajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang melatar belakangi dikeluarkannya kebijakan keagamaan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I ?
2. Apa bentuk kebijakan keagamaan yang dikeluarkannya ?
3. Bagaimana kebijakan itu dilaksanakan ?

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Sebuah penelitian diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu penelitian tentang kebijakan keagamaan di Kasultanan Yogyakarta tahun 1755-1792 ini diharapkan dapat mencapai tujuan dan memberi manfaat.

Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh agama Islam di Kasultanan Yogyakarta.
- b. Untuk memberikan gambaran tentang pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono I di Kasultanan Yogyakarta.

- c. Untuk mengetahui perkembangan politik keagamaan yang dijalankan Sri Sultan Hamengku Buwono I

Kegunaan Penelitian :

1. Untuk memberi sumbangan pemikiran kepada masyarakat tentang kebijakan keagamaan Sri Sultan Hamengku Buwono I
2. Untuk melengkapi hasil penelitian tentang Yogyakarta yang telah banyak dilakukan sebelumnya
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian yang lebih lanjut

E. TINJAUAN PUSTAKA

Kajian mengenai kasultanan Yogyakarta telah banyak dilakukan baik dalam khasanah pustaka, media cetak maupun dalam forum-forum khusus seperti seminar. Akan tetapi buku-buku penelitian yang membahas secara khusus tentang pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono I relatif masih terbatas, terlebih lagi kajian mengenai beberapa kebijakan yang dikeluarkannya.

Adapun studi yang mencalaah tentang Sri Sultan Hamengku Buwono I di kasultanan Yogyakarta dilakukan oleh M.C. Ricklefs dalam karyanya yang berjudul "*Yogyakarta under Sultan Mangkubumi 1749-1792*". Pada dasarnya buku ini berkisah tentang sejarah pembagian kekuasaan di Jawa, terutama yang berkaitan dengan perjanjian Giyanti. Ricklefs menulis bahwa ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I yang terkait dalam bidang politik dan budaya. Diantaranya adalah membentuk pemerintahan yang mengangkat pengikut-pengikutnya yang terbaik serta pemulihan stabilitas

keamanan. Dan dikatakan juga Sri Sultan Hamengku Buwono I berusaha untuk meneruskan tradisi dari penguasa sebelumnya pada waktu dinasti Mataram. Sedang kajian yang membahas secara khusus tentang keagamaan Sultan Hamengku Buwono I belum dijelaskan secara konkrit dan terperinci dalam buku ini.

Buku penelitian yang lain seperti karya Syafii yang berjudul *"Pangeran Mungkubumi Pendiri Kerajaan Yogyakarta"*. Penulis buku ini lebih banyak menceritakan tentang kondisi Mataram serta pristiwa-pristiwa penting yang terjadi. Sedangkan kajian khusus tentang Hamengku Buwono I belum banyak terungkap.

G. Moedjanto, MA menulis *"Konsep Kekuasaan Jawa"* (Penerapannya oleh Raja-raja Mataram) yang merupakan buku kumpulan karangan-karangan penulis. Karya ini tidak spesifik mengkaji tentang sejarah Kasultanan Yogyakarta, namun lebih menonjolkan pada konsep-konsep yang berada di dalamnya seperti doktrin keagung binataraan yang dimiliki seorang raja.

Sutrisno Sukoyo dalam karyanya yang berjudul *"Sejarah Kasultanan Yogyakarta"*. Pengarang membuat periodesasi dalam melihat sejarah berdirinya Kasultanan Yogyakarta.

Sedangkan buku-buku yang membahas secara khusus tentang Yogyakarta cukup banyak, antara lain oleh Darmo Sugito dengan judul *"Kota Yogyakarta 200 tahun"* yang menjelaskan tentang kasultanan Yogyakarta pada masa Sri Sultan Hamengku Buwono I.

F. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikategorikan sebagai studi historis yang menggunakan metode historis, yaitu sekumpulan prinsip dan aturan yang sistematis untuk memberikan bantuan secara efektif dalam usaha mengumpulkan bahan-bahan bagi sejarah, menilai secara kritis dan kemudian menyajikan sintesa dari hasil yang didapatkan¹⁴.

Analisa secara kritis dan juga penyajian sintesa diharapkan untuk menjadikan penyajian dan kisah sejarah yang dapat dipercaya¹⁵.

Metode historis ini bertumpu pada empat langkah kegiatan, yaitu :

a. Heuristik

Tahap ini merupakan pengumpulan sumber data yang sesuai dengan pokok persoalan dari topik yang akan diteliti. Heuristik merupakan metode untuk menemukan jalan baru secara ilmiah untuk memecahkan masalah¹⁶.

Dalam pengumpulan sumber data baik primer maupun sekunder, penulis mencari bahan literatur dari sumber-sumber tertulis yang berupa arsip, dokumentasi, buku-buku penelitian yang berkaitan dengan Kasultanan Yogyakarta, khususnya pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono I. Selain itu penulis melakuakan wawancara dengan narasumber

¹⁴ Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah, terjemahan Nugroho Notosusanto, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986), hlm 115

¹⁵ Hugiono, Hakikat Sejarah dan Metode Sejarah, (Jakarta : Bina Aksara, 1987), hlm 40

¹⁶ Anton Bekker dan Ahmad Chares Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat, (Yogyakarta : Kanisius, 1996), hlm 52

yang mengerti tentang keraton Yogyakarta seperti para kerabat keraton Yogyakarta.

Metode ini digunakan untuk melengkapi, menyempurnakan dan mengecek hasil pengumpulan data kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan para informan yang dianggap mampu memberi penjelasan mengenai informasi yang dibutuhkan penulis, sehingga data yang diperoleh akan mendekati kebenaran.

b. Verifikasi atau kritik sumber

Penulis menyeleksi dari sumber-sumber yang dipakai dalam penelitian ini untuk dokumen tertulis yang memuat tentang sejarah keraton Yogyakarta. Penulis berusaha untuk membandingkan berbagai cetakan yang ada. Apabila dokumen tersebut mengalami perubahan dan penyaduran berkali-kali dicari yang paling mendekati yang asli dalam aspek waktu.

c. Interpretasi

Tahap ini digunakan penulis untuk mencoba menafsirkan data yang telah diseleksi dan teruji keabsahannya. Data yang dieroleh selanjutnya dapat dikaitkan dan dihubungkan sehingga menjadi kesatuan yang harmonis.

d. Historiografi

Dalam hal ini penulis menyajikan sumber-sumber data yang dipercaya menjadi suatu bentuk penulisan kisah sejarah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik. Penelitian ini merupakan penelitian historis yakni suatu penelitian yang mengaplikasikan metode pemecahan masalah secara ilmiah dari perpektif historis.¹⁷ Dengan deskriptif sebagai metode. Skripsi ini diharapkan dapat menghasilkan gambaran deskriptif bersifat menguraikan kejadian dengan dimensi ruang dan waktu serta dapat memberikan jawaban atas pertanyaan apa, bilamana dan dimana. Sedangkan analitik bersifat membentangkan faktor-faktor kondisional dalam determinan-determinan dari peristiwa serta menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana.¹⁸

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam usaha menjadikan sebuah tulisan yang memiliki kesatuan, bulat dan utuh, maka penelitian ini disusun secara sistematis menjadi lima bab.

Bab pertama adalah Pendahuluan. Bab ini pada dasarnya berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bagian pendahuluan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang pembahasan dari permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, sehingga pembaca dapat lebih mudah memahami dan mengetahui isi skripsi secara umum.

Bab dua dimulai dengan pembahasan tentang kondisi masyarakat Mataram sampai pada masa Kasultanan Yogyakarta di bawah Sri Sultan Hamengku

¹⁷ Surahmad Winarno, pengantar penelitian ilmiah dasar metode teknik, (Bandung : Tarsito, 1985), hlm

Buwono I di bidang politik, sosial budaya dan keagamaan. Dengan mendeskripsikan kondisi sebelum Kasultanan Yogyakarta, dapat lebih mudah untuk memahami kronologi perkembangan agama Islam di Yogyakarta dan latar belakang kebijakan keagamaan yang dikeluarkan.

Bab tiga membahas perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat pada kurun waktu tertentu dan merupakan persoalan yang menarik dan menjadi salah satu indikator dalam mengkaji suatu daerah. Oleh karena itu, bab tiga membahas secara khusus tentang Kasultanan Yogyakarta yang meliputi sejarah berdirinya dan pembahasan tentang pemerintahan Kasultanan Yogyakarta.

Bab empat membahas tentang politik keagamaan di Kasultanan Yogyakarta di bawah kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono I, yang terbagi dalam tiga sub bab, yakni aktivitas keagamaan Sri Sultan Hamengku Buwono I, dan hubungan dengan para ulama, serta bentuk-bentuk kebijakan yang terbagi atas bidang sosial keagamaan, upacara keagamaan dan hukum.

Bab lima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari uraian yang telah disajikan dalam isi skripsi.

¹⁸ Sartono Kartodirjo, pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah, (jakarta : Gramedia, 1992), hlm 4

Kebijakan
no 1 dapat
n masih me
masyarakat
Itan Hameng
tan
Sudut pand
Yogyakarta
dan sebaga
agama Islam
Penulis tent
Kalau ada,
nemahamin
enelitian d
'ogyakarta.
eterbatasan
enulis, meny
uri sempurn
engembangka

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan mengenai kebijakan keagamaan Sri Sultan Hamengku Buwono I di Kasultanan Yogyakarta tahun 1755-1792 adalah sebagai berikut :

Sri Sultan Hamengku Buwono I sebagai seorang raja di Kasultanan Yogyakarta memiliki misi untuk mensyiaran agama Islam kepada masyarakat. Gelar Panatagama Khalifatullah yang disandang Sri Sultan Hamengku Buwono I mengharuskan untuk mengembangkan, mempertahankan sekaligus memelihara agar agama Islam dapat menyebar luas di kalangan semua rakyatnya. Untuk itu Sri Sultan Hamengku Buwono I mengeluarkan kebijakan dalam bidang keagamaan guna mempermudah mensyiaran agama Islam kepada rakyat Kasultanan.

Bentuk kebijakan yang dikeluarkan Sri Sultan Hamengku Buwono I terbagi atas : kebijakan di bidang sosial keagamaan, hukum, dan upacara keagamaan. Di bidang sosial keagamaan, terealisasi dengan berdirinya masjid Agung dan masjid Pathok Negara.. Sedangkan upacara keagamaan yang ada di Kasultanan Yogyakarta adalah gerebeg, sekaten, dan labuhan.. Dalam bidang hukum, Sri Sultan Hamengku Buwono I mengadakan Pengadilan Surambi sebagai bentuk peradilan di Kasultanan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya
1989 Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia.
- Anton Bekher dan Ahmad Charis Zubair,
1996 Metodologi Penelitian Filsafat. Yogyakarta :
Kanisius.
- Abdul, Baqir
Masjid-masjid bersejarah di Indonesia, Yogyakarta :
Gema Insani Press
- Astuti, Hendrato
1975 Bahasa Kedhaton. Jakarta : Yayasan Perpustakaan
Nasional.
- A, Syahri
1985 Implementasi Agama Islam pada Masyarakat Jawa.
Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia.
- B. Soelarto
1995/1996 Garebeg di Kesultanan Yogyakarta. Yogyakarta:
Kanisius.
- De Graff, HJ
1986 Puncak Kekuasaan Mataram. Jakarta : Grafiti Pers.
- Dudung, Abdurrahman
1999 Metodologi Penelitian Sejarah. Jakarta: Logos.
- Dinas P dan K DIY
1997 Upacara Adat Keraton Ngayogyakarta dalam
Setahun. Yogyakarta : t.p.
- Djoko, Soekiman
1986 Sejarah Kota Yogyakarta
- Ensiklopedi Islam Indonesia
Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia.
- Exposisi Kempen
1950 Riwayat Sekaten. Yogjakarta : t.p.

- F.A. Sutjipto
Beberapa Aspek Kehidupan Priyayi Jawa Masa Dahulu. Jurusan Sejarah UGM Seni Bacaan Sejarah. Yogyakarta : t.p.
- GPH, Buminata
Serat Kuntaratama (Adeging Nagari Dalem). Yogyakarta: t.p
- G. Moedjanto
1994
Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Yogyakarta: Kanisius.
-
- 1999
Koentjaraningrat
1953
Konsep Kekuasaan Jawa : Penerapannya oleh Raja-raja Mataram. Yogyakarta: Kanisius.
- Khairuddin
1954
Sejarah Kebudayaan Indonesia. Yogyakarta: Jambatan.
- Louis, Gottschalk
1986
Filsafat Kota Yogyakarta. Yogyakarta: Liberty.
- M. Jandra, ed
1989-1990
Pakaian serta Makna Simbolis Upacara di Lingkungan Kraton Yogyakarta. Yogyakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mohamad, Oemar
1984
Sejarah Daerah Jawa Tengah. Jakarta: t.p.
- M.C, Ricklefs
1995
Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
-
- 1974
Moelyono, Sastroharjatmo,
1987
Jogjakarta Under Sultan Mangkubumi 1949-1792. London : Oxford University Press.
- Babab Nitik Ngayogyakarta. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

- Nugroho, Notosusanto
Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer. Jakarta: Inti Indrayu Press.
- Noto Suroto
1985-1986
Kasultanan Yogyakarta. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. t.p.
- Panitia MTQ Nasional
1991
Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Yogyakarta : t.p.
- Panitya Peringatan Kota Jogjakarta 200 Tahun
1955
Kota Jogjakarta 200 Tahun: 7 Oktober 1756 - 7 Oktober 1956. Yogyakarta: t.p.
- Poerwodarminta
1939
Kamus Baoesastra Djawa. Batavia
- RM Soemaryo, Nitinegoro
Sejarah Berdirinya Kota Kebudayaan Yogyakarta Hadiningrat. Yogyakarta: Yayasan Pendidikan Tinggi Putra Jaya.
- Ramlan, Surbakti
1992
Memahami Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia.
- Sutrisno, Kutoyo
1996
Sri Sultan HB IX (Riwayat Hidup dan Perjuangan). Jakarta : Mutiara Sumber Widya.
- Soedarisman, Poerwokoesoemo
1984-1988
Perkembangan Sistem Pemerintahan di Jogjakarta.
- Soedomo, Banjaransari
1952
Sejarah Pemerintahan Kota Yogyakarta. Jojakarta: Djawatan Penerangan Kota Praja Jogjakarta.
- Suhartono, Pranoto
2001
Seriwan Budaya Feodal. Yogyakarta: Agastya Media.

- Syafii
1998 Pangeran Mangkubumi Pendiri Kerajaan
Yogyakarta. Bandung : PT Sangga Buwana
- Soekanto
1952 Sekitar Yogyakarta 1755 –1825. Jakarta:
Mahadaya
- Soekanto, Soerjono
1981 Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : UI Press.
- Selo, Soemardjan
1991 Perubahan Sosial di Yogyakarta. Yogyakarta:
Universitas Gajah Mada Press.
- Sri Sumarsih, ed
1989 – 1990 Upacara Tradisional Labuhan Keraton Yogyakarta.
Yogyakarta : t.p.
- Wibatsu, Harianto
2000 Sultan HB I, Pahlawan Pejuang Bahasa Patriot
Peletak Dasar Demokrasi Penyelamat Negara.
Yogyakarta : Yayasan Mahdaragiri Mataram.
- Widiyastuti
1995 Fungsi Latar Belakang Pendirian dan Peranan
Masjid Pathok Negara di Kasultanan Yogyakarta
- Zarkasji, Abdul Salam
1999/2000 Pengadilan Surambi di Yogyakarta (Studi Historis
Tentang Pengadilan Agama di Yogyakarta tahun
1755-1882). Yogyakarta: t.p.

CURRICULUM VITAE

Nama : Khoirun Nisak

Tempat/Tgl. Lahir : Bantul, 1 Maret 1979

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Mayjend Sutoyo No. 7, Nyangkringan, Bantul
Yogyakarta

Orang Tua :

Nama Ayah : H.M. Wardani

Nama Ibu : Hindun

Latar Belakang : - SDN Bantul III lulus tahun 1991

Pendidikan

- SLTPN 2 Pandak Bantul lulus tahun 1994
- SMUN 1 Jetis Bantul lulus tahun 1997
- IAIN Syaiful Kalijaga lulus tahun 2001